

## ANALISA SINGKAT UPAYA POLRI DALAM MENANGANI KERUSUHAN DI ACEH

Oleh : Kol Pol Drs. Mukdin Lingga

### I. PENDAHULUAN.

1. Kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Aceh seakan akan telah menenggelamkan Aceh dari segala kebesaran masa lampau. Sebagaimana diketahui bahwa Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah yang melahirkan pejuang-pejuang yang tidak dapat ditaklukkan oleh penjajah Belanda. Pada masa perang kemerdekaan masyarakat Aceh dengan semangat kebersamaan telah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dengan bergotong royong secara sukarela mengumpulkan harta benda yang kemudian dibelikan sebuah pesawat Dakota untuk

disumbangkan kepada negara R.I yang sedang dalam keadaan sulit.

2. Kebesaran masa lampau tersebut seakan akan terlupakan begitu saja dengan munculnya gejolak yang tidak habis-habisnya yang diawali dengan pemberontakan DI/TII tahun 1952 oleh Teuku Daud Beureuh, kemudian dilanjutkan oleh Hasan Tiro yang baru kembali dari Swedia tahun 1976 dengan memproklamasikan Negara Islam Aceh Sumatera pada bulan Desember 1976. Gerakan ini kemudian dapat ditumpas pada tahun 1982 sedangkan Hasan Tiro berhasil lolos ke luar negeri, namun pengikut-



pengikutnya tetap melakukan aksi-aksi teror mengganggu keamanan yang disebut GPK/GPL. Untuk menghadapi GPL Hasan Tiro ABRI pada waktu itu melancarkan operasi dengan sandi Jaring I s/d IX yang dimulai tahun 1989 s/d 1998 sehingga sebagian daerah Aceh (Pidie, Aceh Utara dan Timur) menjadi Daerah Operasi Militer (DOM).

3. Sejalan dengan arus Reformasi maka Menhankam/Pangab atas nama Pemerintah RI mencabut status DOM serta menarik satuan ABRI non organik dari wilayah Aceh, masalah keamanan dan ketertiban Aceh diserahkan kepada Aparat keamanan bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Akan tetapi kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh GPL Hasan Tiro untuk membangun kembali kekuatan dan melakukan teror dengan penyebaran isu Referendum, serta mengangkat masalah kekayaan alam daerah Aceh yang lebih banyak dinikmati Pemerintah Pusat, sehingga isu Referendum untuk menjadi negara Merdeka semakin membahana tidak saja diberberapa Kabupaten, yang tadinya dijadikan basis GPL Hasan Tiro akan tetapi sudah menjalar keseluruhan Aceh.

**Kelemahan  
Pemerintah baik  
Orde Lama dan  
Order Baru yang  
kurang mampu  
mengakomodasi  
aspirasi rakyat Aceh  
telah menimbulkan  
gerakan-gerakan  
separatfis**

4. Dalam perkembangan selanjutnya GPL Hasan Tiro berhasil melakukan berbagai aksi teror dan tindakan kekerasan lainnya seperti penculikan/pembunuhan, penyerangan Mako TNI/Polri, pembakaran-pembakaran gedung Instansi Pemerintah, unjuk rasa bahkan penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran bendera GAM dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang menjurus tindakan makar. Untuk mengatasi situasi tersebut Menhankam/Panglima TNI memutuskan mengirim Satuan PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) yang anggotanya terdiri dari TNI dan Polri, namun kehadiran pasukan PPRM inipun tidak mampu meredam situasi yang semakin memburuk bahkan banyak pihak yang justru menentang kehadiran PPRM di Aceh, termasuk tokoh-tokoh masyarakat/ulama Aceh, akhirnya penugasan PPRM ditarik dari penugasan lapangan ke Mako-Mako TNI.

## II. PERMASALAHAN.

5. Ide Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya telah muncul pada awal kemerdekaan semenjak masyarakat Aceh sadar dan merasakan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kelemahan Pemerintah baik Orde Lama dan Order Baru yang kurang

mampu mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh telah menimbulkan gerakan-gerakan separatis seperti pemberontakan DI/TII di tahun 1952 dibawah pimpinan Teuku Daud Beureuh yang dapat ditumpas oleh Kodam I/Iskandar Muda dan didukung negoisasi pemerintah pusat, namun karena penyelesaiannya tidak tuntas maka timbul lagi Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro (pengikut Teuku Daud Beureuh). Menghadapi gerakan tersebut penanggulangannya dengan mengutamakan pendekatan keamanan dimana Kodam I/BB menggelar operasi militer dengan sandi jaring I s/d IX. (1989 s/d 1998), namun upaya ini dinilai kurang berhasil, demikian pula dengan pengerahan PPRM yang beranggotakan TNI dan Polri yang tidak dapat diterima oleh rakyat Aceh, bahkan beberapa pakar dan tokoh masyarakat Aceh sangat menentang sehingga memperburuk situasi di Aceh.

Yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Mengapa ide Gerakan Aceh Merdeka di Aceh timbul dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ide tersebut mendapat dukungan masyarakat ?
- b. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah, mengapa upaya tersebut kurang berhasil ?

### III. DATA / FAKTA.

6. Gerakan separatis yang menuntut Aceh Merdeka diawali dengan pemberontakan DI/TII pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh, pemberontakan ini berjalan  $\epsilon$  10 tahun, melalui pendekatan negoisasi antara Pemerintah RI dengan pimpinan DI/TII pada waktu itu akhirnya Daud Beureuh beserta sebagian anak buahnya menyerah dan kembali ke pangkuan RI.

7. Pada bulan Oktober 1976 HASAN TIRO (pembantu Daud Beureuh) yang baru kembali dari Swedia merekrut teman-teman lamanya dan mendirikan NEGARA ISLAM ACEH SUMATERA yang kemudian diproklamirkan pada bulan Desember 1976, dengan alasan :

- a. Wilayah Aceh merupakan bekas kerajaan/kesultanan Aceh dimasa lalu, berdasarkan fakta sejarah bahwa Aceh pernah ditaklukkan oleh Belanda maupun Jepang. Karena itu Aceh tidak termasuk Negara Kesatuan RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Hasan Tiro merupakan cucu dari SYECH SAMAN pemegang mandat kekuasaan pemerintahan Aceh terakhir untuk itu Hasan Tiro merasa berhak atas posisi kepemimpinan Aceh.
- b. Ketika Hasan Tiro kembali dari pengasingan di Amerika

Serikat pada tahun 1976 melihat realita bahwa pembangunan di Aceh tidak seimbang dengan pembangunan di daerah lain padahal potensi sumber daya alam di Aceh cukup besar.

8. Pada tahun 1982 Kodam I/Iskandar Muda berhasil menumpas gerombolan Hasan Tiro, sebagian anak buahnya berhasil meloloskan diri ke hutan dan sebagian lagi ke luar negeri (Malaysia, Muangthai). Namun pada tahun 1989 mereka bergabung kembali dan mengadakan pengacauan di daerah Aceh dalam bentuk penghadangan dan penyerangan pos-pos ABRI yang terpencil, antara lain yang menonjol adalah penyerangan terhadap Koramil Kecamatan Tiro dan SST Yonif 113/YS yang sedang melakukan AMD di daerah Lhokseumawe, dalam peristiwa ini telah jatuh korban 20 orang warga sipil dan ABRI dan berhasil merampas 21 pucuk senpi M-15 A1

9. Untuk mengendalikan Stabilitas Keamanan di Aceh maka Kodam I/Bukit Barisan menggelar operasi dengan sandi Operasi Jaring I s/d IX yang berlangsung sejak tahun 1989 s/d 1998 yang tujuannya menghancurkan GPL Hasan Tiro dan ide separatis Aceh Merdeka,

yang pada waktu itu terkonsentrasi di 3 (tiga) kabupaten yaitu : Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

10. Sejalan dengan arus reformasi, maka pada tanggal 7 Agustus 1989 Menhankam/Pangab atas nama Pemerintah RI mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan menarik satuan ABRI non organik dari wilayah Aceh, pada kesempatan itu Menhankam/Pangab juga telah menyatakan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh atas kesalahan prajurit ABRI selama melaksanakan operasi di Aceh. Pada kesempatan ini disepakati pula bahwa masalah keamanan dan ketertiban di Aceh diserahkan kepada Aparat Keamanan, Pemda bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh diharapkan secara mandiri dapat menegakkan keamanan dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya.

11. Arus reformasi yang terus bergulir telah membuka peluang kebebasan beraspirasi dan berekspresi di seluruh tanah air, peluang ini telah dimanfaatkan oleh GPL Hasan Tiro untuk membangun kembali kekuatannya, mereka dengan sengaja menyebarkan isu Referendum dengan menggerakkan tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa dan menghidupkan kembali Aceh Merdeka ditambah

lagi dengan pengungkapan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ABRI pada masa DOM. Pada awalnya upaya-upaya GPL Hasan Tiro hanya mendapat respons di 3 (tiga) kabupaten yang merupakan basis GPL Hasan Tiro, namun demikian dengan berbagai cara mereka berhasil membesar-besarkan seakan-akan merupakan aspirasi seluruh masyarakat Aceh.

12. Sejak dicabutnya status DOM selama 6 bulan pertama (Nopember 1998s/d Mei 1999) situasi keamanan di Aceh semakin buruk diawali dengan peristiwa Blang Kandang Muara Dua Aceh Utara yang dilanjutkan dengan pengrusakan kantor milik Pemerintah termasuk kantor Polsek dan Koramil bahkan prajurit ABRI ada yang diculik dan dibunuh. Pada tanggal 3 Mei 1999 terjadi unjuk rasa masyarakat ke Mako DENRUDAL yang memprotes tindakan ABRI melakukan razia-razia ke pemukiman penduduk. Dalam upaya membubarkan pengunjuk rasa, selanjutnya terjadi pula aksi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan bendera GAM. Untuk mengatasi situasi tersebut Menhankam/Panglima TNI memutuskan mengirim satuan PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) yang anggotanya terdiri dari TNI dan Polri yang dipersiapkan menghadapi kerusuhan massa, akan tetapi yang dihadapi kemudian adalah gerombolan bersenjata yang melakukan teror dan bergerilya di-

tengah masyarakat. Hingga bulan Juli 1999 situasi keamanan di Aceh khususnya Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur belum membaik bahkan cenderung semakin memburuk, sebagian besar masyarakat dicekam rasa ketakutan dan terjadilah gelombang pengungsian besar-besaran. Tuntutan masyarakat Aceh akan KEISTIMEWAAN. Daerah istimewa Aceh yang tidak jelas wujudnya, masalah perimbangan penerimaan daerah yang dari pengolahan sumber daya alam, keinginan untuk merdeka sendiri dengan tuntutan Referendum menyebabkan masalah di Aceh semakin kompleks, sementara korban baik dipihak TNI/Polri dan masyarakat terus berjatuhan.

13. Atas saran Komnas HAM kepada Pemerintah yang mendesak Presiden untuk mengambil prakarsa baru dalam bentuk penyelesaian politik masalah Aceh. Komnas HAM menilai bahwa penanganan secara militer yang selama ini dipakai tidak berhasil, bahkan memperburuk situasi di Aceh berdasarkan kebijaksanaan Menhankam/Panglima TNI tanggal 18 Agustus 1999 bahwa pasukan TNI telah ditarik dari daerah pemukiman ke satuan TNI terdekat.

14. Perkembangan situasi gangguan Kamtibmas di Aceh dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Juli, Agustus, September 1999) dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah gangguan Kamtibmas.

No.	JENIS KEJADIAN	BULAN				
		JULI	AGT	TREND	SEPT	TREND
1.	Pembakaran	62	36	-42%	16	-56%
2.	Penyerangan Mako	1	9	800%	1	-89%
3.	Hadang/Kontak Senjata	3	9	200%	3	-67%
4.	Penembakan	24	19	-21%	12	-37%
5.	Pembunuhan	12	15	25%	8	-47%
6.	Curas	23	6	-74%	15	150%
7.	Aniaya Berat	1	2	100%	1	-50%
8.	Penculikan	5	9	80%	11	22%
9.	Pengancaman	1	1	0%	4	300%
10.	Unjuk Rasa/Mogok	12	17	42%	6	-65%
11.	Narkotika/Ganja	9	9	0%	8	-11%
	JUMLAH	153	132	-14%	85	-36%

Terjadi trend penurunan pada bulan Juli - Agustus - 14% sedangkan untuk bulan Agustus - September trend penurunan 36%.

b. Kasus Per Wilayah.

JENIS KEJADIAN	AGUSTUS									
	A B E S	P I D E S	A U T I M	A T I M	A B A R	A S E L	A T E N G	A G A R A	S B G	J M L
PEMBAKARAN	2	7	12	3	1	11	-	-	-	38
PENYERANGAN MAKO	-	3	4	2	-	-	-	-	-	9
HADANG/KONTAK SJT	-	3	6	-	-	-	-	-	-	9
PENEMBAKAN	-	2	4	3	5	5	-	-	-	19
PEMBUNUHAN	-	-	39	3	1	2	-	-	-	15
CURAS	1	-	5	-	-	-	-	-	-	6
ANIAYA BERAT	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
PENCULIKAN	-	5	3	-	1	-	-	-	-	9
PENGANCAMAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
UNJUK RASA/MOGOK	10	2	2	3	-	-	-	-	-	17
NARKOTIKA/GANJA	1	1	3	3	1	-	-	-	-	9
JUMLAH	14	24	48	18	9	19	-	-	-	132

JENIS KEJADIAN	SEPTEMBER										
	A B E S	F I D I E	A U G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D I S E M B E R	S E P T E M B E R	S E P T E M B E R	S E P T E M B E R	J M L
PEMBAKARAN	1	1	3	1	-	10	-	-	-	-	16
PENYERANGAN MAKO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
HADANG/KONTAK SJT	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3
PENEMBAKAN	-	-	6	-	1	5	-	-	-	-	12
PEMBUNUHAN	-	1	-	2	1	4	-	-	-	-	8
CURAS	1	2	7	3	-	2	-	-	-	-	15
ANIAYA BERAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENCULIKAN	3	1	1	-	4	2	-	-	-	-	11
PENGANCAMAN	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	4
UNJUK RASA/MOGOK	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6
NARKOTIKA/GANJA	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	8
JUMLAH	10	8	26	7	9	24	1	-	-	-	85

c. Korban manusia.

NO.	IDENTITAS	KORBAN	BULAN			
			JULI	AGST	SEPT	JML
1.	TNI	MD	12	6	4	22
		LUKA	15	14	1	30
		CULIK	0	1	3	4
2.	POLRI	MD	5	7	3	4
		LUKA	10	6	6	22
		CULIK	0	1	-	1
3.	MASYRAKAT	MD	54	22	3	79
		LUKA	10	27	0	37
		CULIK	1	19	16	36
4.	GBPK	MD	1	16	-	17
		LUKA	-	2	2	4
JUMLAH			107	103	38	248

d. Modus Operandi

No.	Jenis Kejadian	Modus Operandi	Lokasi
1	2	3	4
1.	Pembakaran	- Didahului pengancaman - Bakar dengan gunakan bensin	- Gedung Pemerintah - Mobil Umum
2.	Penyerangan Mako	- Didahului penembakan - Malam hari, dari belakang Mako	- Mako TNI/Polri yang jauh dari keramaian
3.	Penghadangan/ Penembakan	- Menembak secara beruntun - Melakukan pengejaran - Menggunakan senpi laras panjang	- Jalan umum yang sepi - Tempat pengungsian - Pemukiman
4.	Pembunuhan	- Menembak kepala - Menggorok leher - Ikat tangan ke belakang	- Tempat sepi - Jalan umum
5.	Penculikan	- Mendatangi rumah korban - Sweeping massa	- Pemukiman - Jalan umum
6.	Kontak senjata	- Hadang konvoi pasukan - Hadang unit patroli	- Jalan umum
7.	Ganja	- Gunakan angkutan umum - Disembunyikan ditumpukan barang	- Jalan raya Aceh-Medan - Lahan ganja dipedalaman
8.	Penaikan bendera GAM dan Penurunan bendera Merah Putih	- Di dahului dengan pengancaman dan paksaan	- Pemukiman penduduk - Jalan umum
9.	Pengungsian	- Diteror/ditakut-takuti GBPK - Takut terhadap TNI	- Tempat-tempat ibadah - Tempat keramaian dan pemukiman
10.	Peledakan	- Menggunakan Bom rakitan dan GLM	- Gedung Pemerintah - Mako TNI/Polri

e. Jumlah Pengungsi

NO	WILAYAH	BULAN				
		JULI	AGTS	TREND	SEPT	TREND
1.	ACEH TIMUR	1.400	72.894	5107%	2.907	-96%
2.	ACEH UTARA	11.880	169.981	1331%	8.782	-95%
3.	PIDIE	40.550	75.998	87%	800	-99%
4.	ACEH BARAT	258	-	-100%	-	-
JUMLAH		54.088	318.873	490%	12.489	-96%

f. Pengeluaran Kekuatan

1) Jumlah pasukan yang dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan di Aceh sejak 7 Agustus 1999 = 13.460 orang terdiri dari unsur polisi = 7.588 orang, TNI = 5.872 orang dengan rincian :

Polri organik = 4.970 orang  
 BKO = 2.618 orang  
 TNI organik = 3.168 orang  
 BKO = 2.704 orang

Khusus untuk 3 sektor yang dinilai rawan digelar 235 pos dengan rincian :

SEKTOR	PIDIE	A. UTARA	A. TIMUR	JUMLAH
POLRI	49	51	43	143
TNI	44	22	16	82
Jumlah	93	73	59	235

2) Untuk mengantisipasi Gerakan Pengacauan yang dilakukan oleh separatis Aceh maka Polri telah membentuk satuan-satuan tugas :

a) Satgas Pengamanan.

Melaksanakan pengamanan di daerah rawan pada 3 (tiga) wilayah/sektor yaitu Sektor Pidie, Sektor Aceh Utara dan Sektor Aceh Timur dengan prioritas :

- (1) Pengamanan Jalur Sabuk Merah
- (2) Penindakan GBPK.
- (3) Pengamanan Pengungsi.

b) Satgas Kewilayahan.

Kegiatan yang dilakukan Satgas Kewilayahan :

- (1) Pengamanan pengungsi di Aceh Barat.
- (2) Pengamanan sembako di Aceh Tengah.

**Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah, mengapa upaya tersebut kurang berhasil ?**

c) Satgas Bimmas.

Melaksanakan kegiatan yang bersifat upaya preventif dan pre-emptif dalam bentuk kegiatan :

- (1) Penerangan dan penyuluhan.
- (2) Pendekatan kepada tokoh masyarakat, pemuda dan ulama.
- (3) Melakukan pembinaan Potmas.

d) Satgas Resintel.

- (1) Melakukan deteksi terhadap pelaku GBPK.
- (2) Penggalangan kepada masyarakat yang sudah dan belum terprovokasi.
- (3) Melakukan penindakan, penangkapan/penahanan pelaku GBPK.
- (4) Melakukan proses penyidikan perkara.

e) Satgas Penerangan.

Dalam rangka membentuk opini masyarakat dilakukan kegiatan :

- (1) Counter issue.
- (2) Klarifikasi berita
- (3) Propaganda
- (4) Penyuluhan dan penerangan.
- (5) Peliputan

3) Hasil yang dicapai.

- a) Jumlah gangguan kamtibmas

yang terjadi telah ditekan/turun dari 132 kasus dalam bulan Agustus menjadi 85 kasus dalam bulan September (-36%).

- b) Pam jalur sabuk merah dalam bulan September cenderung lebih kondusif, kegiatan transportasi pada siang hari sudah mulai normal.

c) Hasil penindakan.

1) Jumlah GBPK yang ditangkap dalam 2 (dua) bulan terakhir = 63 orang.

2) Jumlah senpi yang disita :

AK-47	= 3 pucuk
AK - 56	= 1 pucuk
Bren	= 1 pucuk
Amunisi	= 384 butir
R2	= 17 unit
R4	= 5 unit
Alkom	= 3 buah
Bom rakitan	= 1 buah
Pistol rakitan	= 1 pucuk

3) Lain-lain yang disita :

- Daun ganja	: 834 kg.
- Pohon ganja	: 2.312 kg.
- Bendera GAM	: 204 lbr.
- Baju loreng	: 8 potong.
- Baret GAM	: 2 buah.

- 4) Pada tanggal 10 April 1999 Polres Utara telah menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama IRWAN BAHAR yang datang ke Polres Aceh Utara dengan tujuan yang kurang jelas. Dari hasil interogasi ternyata oknum tersebut mengaku bernama SULISTIO

bin SEHADI, pangkat Pratu Nrp. 849321482, anggota Ru I Grup II Kopasus Kertosuro Solo yang ditugaskan ke Aceh Utara, Timur dan Pidie bersama 6 300 orang yang terdiri dari personil TNI dan Pegawai PNS sejak bulan September 1999 dengan tugas :

- a. Menggagalkan Pemilu Juni 1999 dengan cara melakukan teror.
- b. Menghilangkan saksi-saksi hidup pada saat DOM.
- c. Mengawasi kekuatan Tim Gegana Polri di Polda Aceh khususnya Aceh Utara.

Pratu SULISTIO bin SEHADI selanjutnya mengaku bahwa penugasan di Aceh dilengkapi dengan senjata api AK-47 sebanyak 75 pucuk, berhubung oknum tersebut anggota TNI maka untuk proses selanjutnya diserahkan ke BIA, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata oknum tersebut bukan personil TNI/Kopasus.

- 5) Berdasarkan kebijaksanaan Menhankam/Panglima TNI tanggal 18 Agustus 1999 bahwa pasukan TNI ditarik dari penugasan di lapangan, untuk itu pasukan Polri telah menggantikan posisi TNI guna menempati pos-pos yang ditinggalkan pasukan TNI tersebut, dan sekaligus merupakan per-

masalahan baru bagi Polri berupa perlunya penambahan pasukan, sarana, prasarana dan dukungan anggaran yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi.

#### 15. Beberapa pendapat para pakar dan pengamat tentang Aceh :

- a. Dr. Fachry Ali, pengamat politik menyatakan pendapatnya dalam Dialog Interaktif Umat Islam dan Tantangan Abad XXI yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1997 di Jakarta :

- 1) HAM mutlak ditegakkan di Aceh, untuk menegakkan Hak Azazi Manusia tersebut maka tentara yang terlibat dalam pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) harus dipidanakan.
- 2) Disamping penegakkan HAM, maka Pemerintah sebaliknya mengakui eksistensi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan demikian pihak Pemerintah dan GAM bisa segera melakukan perundingan. Namun yang terjadi apabila Pemerintah mengakui GAM, siapa pemimpin mereka dan apakah mereka benar-benar ada ?

---

**Aparat Keamanan, Pemda bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh diharapkan secara mandiri dapat menegakkan keamanan dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya.**

---

(Kliping berita Dispen Polri, Republika 2 Agustus 1999).

b. Ketua umum PBNU Abdurrachman Wahid mengutarakan pendapat pada seminar NU Pasca Pemilu 1999 di Jakarta :

1) Prinsip desentralisasi kekuasaan harus sedemikian rupa sehingga berbagai keputusan seperti pemilihan Gubernur, Bupati di Aceh ditentukan rakyat setempat, bukan dari Jakarta oleh Presiden.

2) Prinsip pembagian hasil bumi Aceh dengan presentase 75 persen untuk Aceh dan 25 persen untuk pemerintah pusat.

3) Di Aceh perlu diberlakukan Syariah Islam agar keistimewaan Aceh sebagai Daerah Istimewa menonjol misalnya : tidak ada perjudian, pelacuran, pabrik minuman keras dan peredaran minuman keras.

(Kliping berita Dispen Polri, Republika 2 Agustus 1999).

c. Ir. USMAN HASAN (Ketua Penasehat Presiden untuk Aceh) berpendapat :

Penyelesaian kasus Aceh harus dengan dialog dan tidak dengan senjata, jika dengan kekerasan senjata secanggih apapun rakyat Aceh pasti akan melawan, walaupun mereka harus mati.

(Tabloid Adil : edisi 12-18 Mei 1998).

d. Hasballah M. Said, Sekjen Komite Solidaritas HAM Aceh mengutarakan pendapatnya :

Saat ini rakyat Aceh merasa bahwa TNI tidak lagi menunjukkan sikap bersahabat, hal itu pun dipersepsi seperti pendapat resmi dari Pemerintah Habibie, yang bertolak belakang dengan janji-janjinya di Aceh pada tanggal 26 Maret 1999. Persoalan Aceh harus diselesaikan tanpa menggandakan peluru dan kekuasaan. Biarlah perbedaan persepsi dan pendapat terhadap ketidakadilan diselesaikan secara beradab dan Aceh harus diberi tempat yang sama sebagai bagian dari sebuah negara yang dibangun atas kesepakatan bersama.

(Majalah Forum Keadilan No. 07 tanggal 23 Mei 1999).

e. Pendapat para tokoh masyarakat Aceh dalam pertemuan dengan Kapolri pada tanggal 14 Juli 1999 yang antara lain dihadiri Prof. Dr. Ismail Suni, LL.M, MCL, Dr. Bachtiar Ali MA dan lain-lain berpendapat dan berhadap :

1) Penanganan masalah Aceh sudah diangkat pada level yang paling tinggi yaitu dengan kunjungan Presiden BJ. Habibie ke Aceh dan menyampaikan janji-janji yang belum direalisasi bahwa dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai ingkar janji.

2) Adanya trauma masyarakat Aceh terhadap perlakuan Mi-

liter/TNI semasa DOM dan mengharapkan agar Polri mengambil peran yang lebih aktif.

- 3) Dalam menghadapi GAM dan GPL tidak semata-mata dengan pendekatan Represif, tetapi agar dilakukan pendekatan secara sosiologis, politis dan hukum.
- 4) Adakan rekonsiliasi dengan merebut hati rakyat melalui dialog untuk mencari pemecahan yang terbaik.
- 5) Tangani masyarakat yang telah mengungsi dan lakukan penyidikan terhadap pelanggaran HAM yang telah terjadi.

#### IV. ANALISA DAN EVALUASI.

##### 16. Analisa dan Evaluasi.

a. Kejayaan Aceh dimasa lampau telah tercatat dalam sejarah yang melahirkan pahlawan-pahlawan besar yang menentang penjajah Belanda maupun bala tentara Jepang, sehingga dengan upaya kekerasan Aceh tidak pernah ditaklukan akan tetapi Aceh dapat dijinakkan melali jalur agama oleh SNOUC HOURGRONYE, hal ini secara psikologis memberi warna sikap masyarakat Aceh yang tidak mau menurut dengan cara kekerasan/paksaan.

b. Masih ada pandangan dari beberapa tokoh-tokoh Aceh tertentu yang berpendapat bahwa Aceh merupakan bekas kesultanan/kerjaan Aceh di-

---

**Penyelesaian kasus Aceh harus dengan dialog, tidak dengan senjata.**

**Jika dengan kekerasan senjata secanggih apapun rakyat Aceh pasti akan melawan. Walaupun mereka harus mafi.**

---

masa lalu. Berdasarkan fakta sejarah bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh karena itu mereka menganggap bahwa Aceh tidak termasuk wilayah Negara Kesatuan RI.

c. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat fanatik terhadap ajaran agama Islam yang melahirkan julukan Serambi Mekah untuk daerah ini. Dilandasi dengan fanatisme inilah masyarakat Aceh pernah membuktikan kesetiannya kepada Negara RI dengan bergotong royong mengumpulkan harta benda yang dimilikinya kemudian dibelikan pesawat dakota untuk disumbangkan kepada Pemerintah RI yang banyak berjasa menunjang sarana transportasi udara yang sangat dibutuhkan pada awal kemerdekaan RI.

d. Akan tetapi pada tahun 1952 masyarakat Aceh merasakan adanya perlakuan yang tidak adil oleh Pemerintah RI pada

waktu itu yang menimbulkan gejolak yang diawali dengan pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Teuku Daud Beureuh. Namun dalam tahun 1962 melalui negoisasi dengan Pemerintah pada waktu itu dicapai kesepakatan untuk mengakhiri pemberontakan Aceh dan Teuku Daud Beureuh bersama sebagian anak buahnya kembali kepangkuan RI, namun pada tahun 1976 dilanjutkan lagi oleh Hasan Tiro (yang sebelumnya orang dekat dengan Teuku Daud Beureuh) memproklamkan Negara Islam Aceh Sumatera yang diperkirakan berlanjut sampai sekarang.

#### 17. Aspek Politis.

Timbulnya gagasan Gerakan Aceh Merdeka bertolak dari masa tidak puas terhadap perlakuan Pemerintah Pusat baik pada jaman Pemerintahan ORLA dan ORBA terhadap Daerah Istimewa Aceh terutama jika dibandingkan dengan perhatian terhadap kemajuan wilayah Aceh jika dibanding pembangunan di daerah lain terutama Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta, masyarakat Aceh tidak pernah merasakan keistimewaan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik pada jaman pemerintahan ORLA maupun ORBA

#### 18. Aspek Ekonomi.

Masyarakat Aceh merasakan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan besar

seperti PT Arum LNG, Mobil Oil Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda dan proyek-proyek Vital lainnya sangat kurang memberikan konstribusinya terhadap perkembangan perekonomian warga setempat, yang dirasakan oleh warga Aceh bahwa kekayaan Aceh telah dirampas oleh orang-orang diluar Aceh. Warga Aceh jangankan untuk menduduki kursi penting di perusahaan-perusahaan tersebut, menjadi pegawai rendahanpun sangat sulit. Demikian pula dengan pengelolaan/penguasaan hasil hutan khususnya kepemilikan HPH/HPA yang pada umumnya dikelola oleh perusahaan dari Jakarta dan Medan.

#### 19. Aspek Sosial Budaya.

a. Sudah tradisi masyarakat Aceh bahwa kepatuhan terhadap ulama sebagai pemuka agama sangat dihormati dan menjadi panutan, karena ulama merupakan sumber pengetahuan dan sekaligus menjadi pimpinan spiritual, namun selama ORDE BARU peran ulama telah bergeser bukan lagi sebagai penegak kebenaran dan pemberantasan kemungkinan tapi telah menjadi alat birokrasi untuk menyampaikan pesan politik dalam melegalisir kebijaksanaan Pemerintah.

---

**Anggota organik yang bertugas di Polsek belum didukung senjata baru, sehingga anggota cenderung takut melaksanakan patroli.**

---

b. Penguasa Adat dan Tradisi berada ditangan Sultan dan Ulebalang/ Pemerintah, dimana peraturan adat istiadat, tradisi dan ketentuan-ketentuan duniawi diatur.

Masyarakat sangat patuh dan menghargai sultan dan budaya ini sampai sekarang relatif masih dipegang misalnya kebiasaan melaksanakan kenduri dalam suatu keberhasilan (tepung tawar) pada acara kelahiran, perkawinan sampai pada kematian yang kesemuanya tetap berpedoman dan tidak menyimpang dari Hukum Syariat Islam. Aktualisasi dari tradisi itu sekarang telah diatur oleh Pemerintah dalam perundang-undangan namun pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga keberadaan Aparat dimata masyarakat tidak kurang berwibawa.

c. Penguasa Hukum berada di tangan wajar merupakan Hakim penentu terhadap perbuatan benar dan salah serta ganjaran dan hukuman. Namun pada kenyataannya terhadap hukum yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhi oleh masyarakat, sebab hukum yang ada dirasakan tidak menjamin dan tidak memberikan kepastian terhadap Amar Ma ruf Nahi Mungkar. Seperti pengadilan terhadap pelaku/penanggung jawab ide Gam didukung oleh masyarakat Aceh

baik sipil maupun militer.

## 20. Aspek hukum.

Wilayah propinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno - Hatta, hal ini lebih dipertegas lagi dalam UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan dengan demikian apabila ada pendapat bahwa wilayah Aceh tidak termasuk Negara Kesatuan RI seperti pendapat versi Gerakan Aceh Merdeka sudah dapat dikategorikan perbuatan makar sebagaimana diatur dalam pasal 108 KUHP. Namun demikian pemerintah RI tidak dapat dengan semena-mena melakukan tindakan kekerasan.

## 21. Aspek Pertahanan dan Keamanan.

### a. Aspek Pertahanan.

Posisi Geografis Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan gugusan kepulauan paling barat dari Nusantara sehingga Aceh merupakan corong Barat yang sangat strategis dari aspek pertahanan yang memungkinkan terjadinya infiltrasi yang datangnya dari luar negeri seperti India, Muangthai dan Malaysia, oleh karena itu apabila Aceh lepas dari negara kesatuan RI akan merupakan bahaya bagi Pemerintah RI.

### b. Aspek Keamanan.

1) Jumlah gangguan kamtibmas dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir Juli, Agustus dan September 1999 relatif masih

tinggi, walaupun trend perkembangannya cenderung mengalami penurunan.

2) Jenis gangguan kamtibmas yang menonjol ditinjau dari kuantitas dan kualitas antara lain Pembakaran, Penembakan, Pembunuhan, Curas/Rampok, Kontak Senjata, Unjuk Rasa dan Narkotika/Ganja.

3) Daerah yang paling rawan berdasarkan lokasi kejadian: Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa gangguan kamtibmas yang terjadi sudah menyebar hampir keseluruhan wilayah Aceh. Tempat kejadian yang paling rawan adalah pemungkiman, Jalan Umum, tempat Keramaian, Gedung-Gedung Pemerintah dan Lahan Pertanian.

#### 4) Hasil Penindakan.

a) Proses hukum terhadap para pelaku :

- (1) Tahap lidik = 41 kasus
- (2) Tahap sidik = 19 kasus
- (3) Menunggu P. 21 = 5 kasus
- (4) P-21 = 7 kasus
- (5) Telah divonis = 4 kasus

Melanggar pasal :

- 108 KUHP yo 338 yo 340 KUHP
- 160 KUHP yo 154 yo 155 KUHP
- 328 KUHP yo 160 yo 110 KUHP

b) Dari hasil penyidikan terhadap pada pelaku dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Kelompok GAM/GBPK murni.

(2) Kelompok kriminal yang melakukan tindak pidana dalam bentuk perampokan Bank, Penjarahan dan penyeludupan ganja.

(3) Kelompok Gam-Gam an yaitu kelompok kriminal yang mengaku sebagai anggota GAM dengan melakukan tindakan kriminal :

Pembakaran gedung-gedung sekolah, gedung pemerintah, melakukan teror kepada masyarakat, mengancam aparat pemerintahan desa, diperkirakan kegiatan kelompok ini merupakan rekayasa dari pihak-pihak tertentu.

c) Dalam periode 3 bulan terakhir Polda Aceh telah berhasil menyita € 1 ton daun ganja yang akan diperdagangkan keluar Aceh, walaupun belum terungkap latar belakang/motif perdagangan ganja tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut untuk mendanai GBPK atau gerakan separatis lainnya.

#### c. Penggelaran Kekuatan.

Dengan adanya kebijaksanaan

baga Swadaya Masyarakat) yang dipercayai masyarakat Aceh.

h. Untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi Polri sehubungan dengan kebijaksanaan Pimpinan TNI tentang penarikan pasukan TNI disarankan :

1) Segera mencukupi kekurangan personil untuk mengisi seluruh pos-pos yang sebelumnya ditempati pasukan TNI.

2) Untuk menjaga kesegaran personil yang bertugas di lapangan kiranya diadakan rotasi secara teratur guna menghindari kejenuhan.

3) Penugasan personil di Aceh agar mengutamakan personil yang beragama Islam yang mampu membaaur dengan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari termasuk melaksanakan ibadah sholat di mesjid-mesjid bersama masyarakat.

4) Untuk mendominasi dan mengoptimalkan kinerja Satgas-Satgas yang telah dibentuk, disarankan agar Mabes Polri memprioritaskan penambahan secara bertahap Alut/Alsus antara lain : Sarana Mobilitas Pasukan, Alkomlek Satuan dan Perorangan, Mobil Unit TKP, Senpi bahu untuk anggota di Polsek-Polsek.

5) Meningkatkan kemampuan gerilya anti gerilya bagi anggota dalam menghadapi gerombolan bersenjata. Dengan kemampuan tersebut diharapkan anggota dapat mengklarifikasi kelompok gerombolan apakah kelompok Gam Murni, pelaku kriminal atau Gam-Gaman?

6) Meningkatkan kemampuan Satgas Resintel agar mampu melakukan deteksi dan sekaligus mengungkap jaringan perdagangan ganja di daerah Aceh. ■

## **KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT**

Selamat Hari Ulang Tahun Ke 54 kepada

**KORPS BRIMOB**

pada tanggal 14 Nopember 1999

**Semoga Sukses**

-- Redaksi --